



This study explores the extent of adaptive governance in Indonesia, perceived by the fit-for-purpose governance framework. The policy changes phenomenon on social restriction in Indonesia, from *PSBB* (large scale social restriction) to early *PPKM* (Community Activities Restrictions Enforcement), were utilized to examine the adaptivity of Indonesia's Government framework based on the spectrum of objective, governance strategies, network, and streams of social restriction policies in Indonesia. The study finds a lack of liberty in a social capacity and power domination in central governance. The framework helps to propose some recommendations for facing the complex issue akin to COVID-19 in Indonesia, including; decentralization for creating mutual understanding, the need for more inclusive policy decision making, and lastly, economic and political context must be more reckoned in this issue. Thus, future research is encouraged to consider the primary data with different contexts and variables for a more comprehensive discussion of adaptive governance in all affairs.

*Keyword: adaptive governance; COVID-19; social restriction policy; fit-for-purpose Governance framework.*

## Intisari

Studi ini mengeksplorasi sejauh mana konsep *adaptive governance* di Indonesia, dilihat dari kerangka kerja *fit-for-purpose governance*. Fenomena perubahan kebijakan tentang pembatasan sosial di Indonesia, mulai dari *PSBB* (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sampai dengan *PPKM* (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), dimanfaatkan untuk mengkaji adaptasi kerangka kerja pemerintah Indonesia berdasarkan spektrum objektif, strategi, jaringan dan aliran kebijakan pembatasan sosial di Indonesia. Studi ini menemukan kurangnya kebebasan dalam kapasitas sosial dan dominasi kekuasaan dalam pemerintahan pusat. Kerangka kerja *fit-for-purpose governance* membantu untuk mengusulkan beberapa rekomendasi untuk menghadapi isu rumit yang mirip dengan COVID-19 di Indonesia, termasuk ; desentralisasi untuk menciptakan pemahaman bersama, kebutuhan untuk pengambilan keputusan kebijakan yang lebih inklusif, dan terakhir, konteks ekonomi dan politik butuh lebih diperhitungkan dalam masalah ini. Dengan demikian, penelitian di amasa deoan didorong untuk mempertimbangkan data primer dengan konteks dan variabel yang berbeda diskusi yang lebih komprehensif mengenai *adaptive governance* di segala urusan.